

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Alasan Pemilihan Judul

Banyak yang berasumsi bahwa Kapitalisme sebagai ideologi keluar sebagai pemenang atas runtuhnya sosialis sebagai ideology yang bisa dikatakan telah runtuh. Padahal kapitalis sebagai ideologi akan mengalami kehancuran seperti apa yang diramalakan Marx. Karena bentuk dan pertumbuhan kapitalisme historis seperti yang diramalkannya, misalnya terjadinya konsentrasi dan sentralisasi kekuatan kapital dan terciptanya kemiskinan yang cukup luas pada saat ini telah terjadi.

Secara global sistem ekonomi yang lahir dari ideologi Kapitalis berawal dari asumsi bahwa tujuan aktivitas ekonomi adalah semata-mata untuk mengejar puncak kenikmatan yang bersifat materi. Pada kenyataanya manusia yang mengadopsi pemikiran ini akan memfokuskan diri untuk terus mengejar kenikmatan yang berupa materi bila perlu dengan menghalalkan berbagai cara. Sehingga pada tingkat lanjutan, jika ada sebagian orang yang hidup dalam berkecukupan tapi berada dalam kegelisahan, dan di sisi lain terbentuk komunitas lain yang bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya saja susah. Dan dalam kondisi ini kapitalis tidak bisa menangani kondisi ini. Ada banyak kelemahan yang diperlihatkan oleh sistem ekonomi kapitalis, akan tetapi sistem ini masih saja digunakan sebagai dasar sistem ekonomi dunia termasuk Indonesia. Sehingga penanganan krisis di Indonesiapun mengacu dengan apa yang diyakini



tekanan terhadap mata-mata uang Negara ASEAN dan menjalarlah tekanan devaluasi di wilayah ini.<sup>1</sup>

Krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997 merupakan antiklimaks dari setiap pembangunan-pembangunan yang terus digulirkan di Indonesia. Target 25 tahun yang telah dicanangkan, bahwa Indonesia akan tinggal landas sebagai negara Industri baru, sungguh belum terwujud. Ironisnya, Indonesia malah menjadi salah satu negara terparah yang terkena krisis diantara negara-negara yang lain yang juga terkena krisis. Krisis di Indonesia akhirnya menjadi krisis yang nyaris sempurna, manakala tidak hanya krisis ekonomi saja yang dialami oleh Indonesia akan tetapi juga krisis pendidikan dan krisis kesehatan yang semakin menambah kesempurnaan krisis yang dihadapi oleh Indonesia.

Prof. DR. Mohammad Amien Rais berpendapat bahwa apa yang dialami dan saksikan oleh bangsa Indonesia dalam dasawarsa terkahir abad 20 dan dasawarsa abad 21 sesungguhnya, dalam banyak hal, merupakan pengulangan belaka dari apa yang kita alami pada zaman penjajahan kompeni dan pemerintahan Belanda di masa lalu. Perbedaan antara tempo *doeloe* dengan masa sekarang hanyalah dalam bentuk atau format belaka. Dahulu pendudukan fisik dan militer Belanda menyebabkan Indonesia kehilangan kemerdekaan, kemandirian dan kedaulatan politik, ekonomi, sosial, hukum dan pertahanan. Sedangkan sekarang ini pendudukan fisik dan militer asing itu secara resmi sudah tidak ada dan tidak kelihatan. Tetapi sebagai bangsa kita telah kehilangan kemandirian, dan sampai batas yang cukup jauh, kita juga sudah kehilangan kedaulatan ekonomi.

---

<sup>1</sup> Laporan Akhir Tahun Bidang Ekonomi-Krisis Ekonomi 1998, Tragedi Tak Terlupakan, (diunduh

Dalam banyak hal bangsa Indonesia tetap tergantung dan menggantungkan diri pada kekuatan asing. Kedaulatan ekonomi yang telah kita gadaikan pada kekuatan asing itu hakekatnya telah melemahkan kedaulatan politik, diplomatik, pertahanan dan militer kita. Bisa dikatakan dalam hampir setiap kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri Indonesia selalu kelihatan pengaruh besar kepentingan asing yang melemahkan kepentingan nasional bangsa Indonesia sendiri.<sup>2</sup>

Indonesia bukan tidak berupaya untuk menanggulangi krisis ini, akan tetapi cara yang ditempuh bisa dikatakan kurang membuahkan hasil yang baik. Cara yang dilakukan ini adalah melakukan kerjasama dengan lembaga moneter dunia IMF (*International Monetary Fund*) dan Bank Dunia. Akan tetapi langkah ini justru semakin membuat perekonomian Indonesia carut marut. Indonesia dengan mentah-mentah mengikuti dan menyetujui saran yang ditawarkan dan diusulkan oleh IMF dan Bank Dunia tanpa mau mengaji ulang saran dan perjanjian yang ditawarkan oleh lembaga keuangan dunia tersebut. Padahal tidak semua saran yang diberikan oleh IMF dan Bank Dunia terhadap masalah ekonomi di Indonesia bisa diterapkan dan cocok untuk mengatasi masalah perekonomian bangsa ini. Sebuah kesalahan fatal yang dibuat oleh pemerintahan Indonesia saat itu yang mengakibatkan perekonomian bangsa ini semakin parah. Padahal ada solusi lain yang sebenarnya bisa diterapkan oleh bangsa ini, solusi yang jauh lebih baik daripada rumus-rumus yang diberikan IMF dan Bank Dunia kepada Indonesia.

---

<sup>2</sup> Mohammad Amien Rais, *Agenda-Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia* (Yogyakarta: PPSK Press, 2008), hal. 1-2.

Mengapa Indonesia terus saja miskin dan tak kunjung terlepas dari krisis yang melanda. Hal itu karena Indonesia tidak cocok menggunakan sistem pasar bebas. Seorang kritikus terhadap globalisasi Joseph Stiglitz berasumsi bahwa ekonomi pasar tidak pernah menghasilkan efisiensi karena adanya informasi asimetris dari pelaku pasar. Tangan yang tidak kelihatan (*invisible hands*) yang mengatur pasar sejatinya tidak pernah ada. Yang adalah bahwa pelaku pasar yang menguasai informasi akan meneguk keuntungan atas kerugian mereka yang miskin akan informasi. Dan IMF memaksakan konsep pasar bebas terhadap negara-negara yang menjadi nasabahnya. IMF berkeyakinan bahwa keterbukaan ekonomi dan liberalisasi adalah *panacea* atau obat mujarab bagi keterbelakangan ekonomi. Padahal negara-negara yang membuka lebar dirinya terhadap perdagangan bebas, melakukan deregulasi pasar uang, dan mendadak menswastakan perusahaan milik negara dalam kenyataannya justru mengalami kemunduran sosial dan ekonomi. Bukan malah mengalami kemajuan. Liberalisasi pasar modal justru memukul pasar yang baru mulai bangkit di negara berkembang, bukannya memperkuat. Negara berkembang menjadi korban serbuan uang panas (*hot money*) yang masuk, yang pada gilirannya mengangkat kejayaan *real-estate* untuk sementara waktu dan menghasilkan *boom* atau lebih tepat *bubble* (buih). Namun begitu sentimen pasar investasi berubah karena ada perubahan sosial atau politik tertentu, uang yang masuk segera ditarik lagi keluar dan mengakibatkan kehancuran ekonomin (*bust*).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid

Kebijakan dan nasehat IMF salah arah. Apalagi mereka bekerja secara mekanis. IMF menggunakan *rule* yang sama disetiap negara nasabahnya dalam kasus yang berbeda, dan Indonesia menjadi salah satu korban IMF. Selain itu, kaum kapitalis yang dalam hal ini adalah IMF dan Bank Dunia memandang bahwa persoalan ekonomi terletak pada faktor produksi. Sehingga harus ada peningkatan produksi yang secara otomatis harus ada penambahan hutang. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia tak kunjung mentas dari kemiskinan dan krisis yang dialaminya.

Selain itu, kegagalan yang ditunjukkan misalnya dalam menghadapi krisis yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 sistem Kapitalisme gagal dalam memulihkan kembali ekonomi bagi negara-negara yang terkena krisis ekonomi. Hal itu dapat dilihat, bagaimana badan internasional, seperti IMF, World Bank, WTO, yang menangani negara-negara yang kena krisis, belum menunjukkan pulihnya ekonomi negara yang ditangani oleh badan dunia tersebut. Sebaliknya, hasil riset Johnson dan Schaefer (1997) menunjukkan selama 1965-1995, perekonomian 48 dari 89 negara yang menerima bantuan IMF tidak menjadi lebih maju. Bahkan, 32 dari 48 negara tersebut justru menjadi lebih miskin. Lebih menyedihkan lagi, negara-negara tersebut telah menjadi pasien IMF selama puluhan tahun.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Sunarsip, "Seputar Konspirasi IMF," *Republika*, (20 Juni 2001).

Perlu diperhatikan bagaimana pengertian kemiskinan itu sendiri. Adapun pengertian kemiskinan ada bermacam-macam, pengertian kemiskinan yang perlu diketahui dan dipahami adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Kriteria BPS, kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang yang hanya dapat memenuhi makanannya kurang dari 2.100 kalori per kapita per hari.
2. Kriteria BKKBN, kemiskinan adalah keluarga miskin prasejahtera apabila:
  - a. Tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya.
  - b. Seluruh anggota keluarga tidak mampu makan dua kali sehari.
  - c. Seluruh anggota keluarga tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja atau sekolah dan bepergian.
  - d. Bagian terluas dari rumahnya berlantai tanah.
  - e. Tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan.
3. Menurut Bank Dunia menetapkan ukuran garis kemiskinan untuk Indonesia berdasarkan pendapatan perkapita. Penduduk yang pendapatan perkapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional termasuk dalam kategori miskin. Secara umum Bank Dunia menetapkan garis batas kemiskinan sebesar US \$1 perhari bagi negara-negara berkembang dan US\$ 2 bagi negara-negara maju.

Maka penduduk miskin Indonesia mencapai 49 persen atau separuh total jumlah penduduk.<sup>6</sup> Selain itu, menurut Guru Besar dan dosen Pascasarjana

---

<sup>5</sup> *Penyebab Kegagalan Kebijakan dan Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, (diunduh pada: 6 Mei 2010); dari <http://crackbone.wordpress.com/penyebab-kegagalan-kebijakan-dan-program-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia/>

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Prof. Tresna P. Soemardi, "Ditinjau dari sudut sebaran wilayah, angka kemiskinan di perkotaan sekitar 39 persen, dan tingkat kemiskinan di pedesaan sekitar 53 persen,"

Selain itu krisis pendidikan dan kesehatan juga masih dialami masyarakat. Banyak generasi penerus bangsa yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya dikarenakan beban biaya pendidikan yang cukup tinggi. Selain itu belum adanya jaminan kesehatan bagi penduduk miskin juga merupakan indikator krisis kesehatan yang di alami oleh bangsa ini. Meskipun sudah ada askeskin yang telah disahkan oleh mantan menteri kesehatan Siti Fadilah Supari, diskriminasi kesehatan bagi rakyat miskin masih saja sering terjadi. Sering kita temui, karena tingginya biaya pengobatan yang harus dibayar membuat rakyat miskin urung untuk berobat meskipun kondisinya sudah cukup parah. ASKESKIN pun seolah-olah tidak berguna lagi.

Melemahnya sistem ekonomi Kapitalis ini mengingatkan kita pada peristiwa depresi besar (*great depression*) pada tahun 1929 yang akhirnya memunculkan aliran Keynes yang menggantikan aliran Klasik (Adam Smith, dkk). Dan sekarangpun aliran Keynes tidak bisa menjawab krisis ekonomi yang terjadi, sehingga banyak orang mulai mencari pengganti dari sistem Kapitalisme. Dan ini sebuah indikasi, bahwasannya sistem Kapitalisme akan runtuh jika ada alternatif terpercaya yang siap menggantinya. Dan dalam hal ini yang berpeluang besar adalah sistem ekonomi islam.

Sistem ekonomi Islam sudah lama diterapkan sejak zaman Rasul Nabi Muhammad SAW serta Khulafaur Rasyidin dan membawa hasil yang memuaskan, hal ini terbukti dari berhasilnya Umar bin Khattab membawa rakyat di bawah kepemimpinannya dalam kondisi ekonomi yang stabil. Pada zaman Umar ibnul-Khaththab, penerimaan baitul mal mencapai 160 juta dirham. Jumlah yang sudah sangat cukup untuk menunjang perekonomian negara pada saat itu.<sup>7</sup>

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka muncul suatu rumusan permasalahan yang nantinya akan dibahas, yakni: *Bagaimana pendekatan konsep sistem ekonomi Islam memberi solusi atas krisis ekonomi di Indonesia?*

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam studi ilmu-ilmu sosial terutama ilmu hubungan internasional, teori ataupun konsep menjadi sebuah alat analisa utama yang memberitahu kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu bisa terjadi. Konsep merupakan “generalisasi” dari sekelompok fenomena tertentu dan merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial.<sup>8</sup>

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, maka penulis akan menggunakan konsep sistem ekonomi Islam dalam pembahasan ini.

---

<sup>7</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal 25-27.

<sup>8</sup> -----, *Panduan Akademik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional* dikutip dari Sofian Effendi, “Ilmu untuk Penelitian Ilmiah” dalam Moeji Singarimbun dan Sofian Effendi (eds.)

## Konsep Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar yaitu kepemilikan, pemanfaatan kepemilikan, dan distribusi kekayaan<sup>9</sup>. Kepemilikan merupakan kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggusnakannya untuk tujuan pribadi. Definisi ini mirip dengan definisi kekayaan, baik pribadi atau publik.<sup>10</sup> Akan tetapi dalam Islam para fuqoha memberikan batasan-batasan syar'i "kepemilikan" dengan berbagai ungkapan yang memiliki inti pengertian yang sama. Di antara yang paling terkenal adalah definisi kepemilikan yang mengatakan bahwa "milik" adalah hubungan khusus seseorang dengan sesuatu (barang) di mana orang lain terhalang untuk memasuki hubungan ini dan si empunya berkuasa untuk memanfaatkannya selama tidak ada hambatan legal yang menghalanginya.<sup>11</sup>

Islam memiliki pandangan yang khas tentang harta. Bahwa harta pada hakikatnya harta adalah milik Allah. Harta yang dimiliki manusia, sesungguhnya merupakan pemberian dari Allah.<sup>12</sup> Demikian juga harta atau kekayaan di alam semesta yang telah dianugerahkan untuk semua manusia sesungguhnya merupakan pemberian dari Allah kepada manusia untuk

---

<sup>9</sup> An-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal .50.

<sup>10</sup> *Kepemilikan*, (diunduh pada 7 April 2010); dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Kepemilikan>

<sup>11</sup> *Kepemilikan dalam Islam*, (diunduh pada 14 Mei 2010); dari

<http://www.scribd.com/doc/2000/07/02/kepemilikan-dalam-islam/>

dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan umat manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Islam memiliki pandangan yang berbeda dengan kaum kapitalis dan sosialis tentang kepemilikan. Dimana mereka para kaum kapitalis dan sosialis berakar dari pandangan yang sama yaitu materialisme. Yang mana kaum kapitalis berpandangan tentang kebebasan kekayaan dan itu merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dengan tanpa peduli tentang bagaimana seseorang itu mendapatkan kekayaannya dan bagaimana cara memanfaatkan kekayaannya itu. Sedangkan kaum sosialis juga tidak kalah ekstrim nya dengan kaum kapitalis, dimana mereka tidak mengakui Hak milik Individu. Oleh karenanya Islam memberi jalan tengah bagi persoalan tersebut. Islam tidak mengenal adanya kebebasan kepemilikan yang berlebihan karena pada dasarnya manusia harus berada dalam kerangka syari'ah termasuk masalah ekonomi. Prinsip dasar konsep sistem ekonomi Islam akan dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Prinsip Kepemilikan**

Unsur dasar sistem ekonomi Islam yang pertama yaitu kepemilikan, menurut Syaikh Taqiyuddin An Nabhani ada tiga macam kepemilikan yaitu:<sup>13</sup>

#### **a. Kepemilikan Individu (*Milkiyyah Fardiyyah*)**

Kepemilikan individu adalah izin syariat pada individu untuk memanfaatkan suatu barang melalui lima sebab kepemilikan

<sup>13</sup> An Nabhani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* loc cit. hal

(*asbab al-tamalluk*) individu yaitu 1) Bekerja (*al-amal*), 2) Warisan (*al-irts*), 3) Keperluan harta untuk mempertahankan hidup, 4) Pemberian Negara (*Itha al-daulah*) dari hartanya untuk kesejahteraan rakyat berupa tanah pertanian, barang dan uang modal, 5) Harta yang diperoleh individu tanpa berusaha seperti hibah, hadiah, wasiat, diat, mahar, barang temuan, santunan untuk khalifah atau pemegang kekuasaan pemerintah. Kekayaan yang diperoleh melalui bekerja (*al-'amal*) meliputi upaya menghidupkan tanah yang mati (*ihya' al-mawat*), mencari bahan tambang, berburu, pialang (makelar), kerjasama, pegawai negeri atau swasta.

b. Kepemilikan Umum (*Milkiyyah 'Ammah*)

Kepemilikan umum adalah izin syariat kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan suatu kekayaan yang berupa barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan benda-benda yang tergolong kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh al-shari' sebagai benda-benda yang dimiliki komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seorang saja. Karena milik umum, maka setiap individu

tidaknya, benda yang dapat dikelompokkan ke dalam kepemilikan umum ini, ada tiga jenis, yaitu: <sup>14</sup>

1) Fasilitas Dan Sarana Umum

Benda ini tergolong ke dalam jenis kepemilikan umum karena menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan. Jenis harta ini dijelaskan dalam hadist nabi yang berkaitan dengan sarana umum yang artinya:

*“Manusia berserikat (bersama-sama memiliki) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api.”*

2) Sumber Alam yang Tabiat Pembentukannya Menghalangi Dimiliki oleh Individu secara perorangan (pribadi), seperti lautan, sungai, masjid, jalan umum.

3) Barang Tambang yang Depositnya melimpah dalam jumlah besar seperti seperti sumberdaya mineral (garam, besi, emas, perak, dan lain-lain).

c. Kepemilikan Negara (Milkiyyah Dauliyyah)

Kepemilikan negara adalah izin syariat atas setiap harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan khalifah sebagai kepala negara. Termasuk dalam kategori ini adalah harta *ghanimah*

---

<sup>14</sup> *Kepemilikan dalam Islam, op.cit.*

(rampasan perang), *fa'i* (harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan), *kharaj* (hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak), *jizyah* (hak yang diberikan Allah kepada kaum muslim dari orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam),  $\frac{1}{5}$  harta *rikaz* (harta temuan), *'usyr* (pajak penjualan yang diambil pemerintah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya dengan pungutan yang diklasifikasikan berdasarkan agamanya), harta orang murtad, harta yang tidak memiliki ahli waris dan tanah hak milik negara.

Agama Islam mengakui hak milik individu dalam masalah harta sepanjang tidak merugikan kepentingan masyarakat luas. Sehingga dari penjelasan tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa dalam memberi solusi akan krisis di Indonesia justru tidak dibenarkan adanya privatisasi atas kepemilikan umum. Karena kepemilikan umum berkaitan langsung dengan pemenuhan hajat hidup orang banyak. Bahkan negarapun tidak boleh memilikinya, negara hanya boleh mengelolanya sebaik mungkin demi kesejahteraan rakyatnya.

#### **b. Prinsip Pemanfaatan Kepemilikan**

Unsur dasar sistem ekonomi Islam yang kedua yaitu pemanfaatan kepemilikan. Kejelasan konsep kepemilikan sangat berpengaruh terhadap konsep pemanfaatan harta milik (*tasharuf al-mal*), yakni siapa sesungguhnya yang berhak mengelola dan memanfaatkan harta tersebut. Pemanfaatan pemilikan adalah cara sesuai hukum syariat

seorang muslim memperlakukan harta miliknya. Ada dua bentuk pemanfaatan harta yakni: pengembangan harta (*tanmiyah al-mal*), dan penggunaan harta (*infaq al-mal*).

1. Pengembangan harta (*tanmiyah al-mal*)

Pengembangan harta adalah upaya-upaya yang berhubungan dengan cara dan sarana yang dapat menumbuhkan pertambahan harta. Islam hanya mendorong pengembangan harta sebatas pada sektor riil saja; yakni sektor pertanian, industri dan perdagangan. Islam tidak mengatur secara teknis tentang budidaya tanaman; atau tentang teknik rekayasa industri; namun Islam hanya mengatur pada aspek hukum tentang pengembangan harta. Dalam sektor pertanian misalnya, Islam hanya mengatur pada aspek hukum tentang pengembangan harta. Dalam sektor pertanian misalnya, Islam melarang seorang muslim menelantarkan tanahnya lebih dari tiga tahun. Dalam perdagangan, Islam telah mengatur hukum-hukum tentang jual beli. Demikian pula dalam hal perindustrian, Islam juga mengatur hukum produksi barang, manajemen dan jasa, semisal hukum perjanjian dan pengupahan. Islam melarang beberapa aktivitas-aktivitas pengembangan harta, misalnya, riba pada perbankan, dan riba pada pasar modal. Menimbun, monopoli, judi, penipuan dalam jual beli, jual beli barang haram dan sebagainya.

Dalam penanganan masalah perbankan di Indonesia, karena Islam melarang adanya riba (penambahan), maka Bank yang

dibolehkan adalah Bank yang sesuai dengan ketentuan Syariah (Bank Syariah). Karena buruknya sistem perbankan Indonesia juga merupakan salah satu gejala krisis yang tidak tertangani dengan baik. Ada banyak unsur spekulasi dalam dunia perbankan konvensional.

## 2. Infaq Harta (*infaq al-mal*)

Infaq harta adalah pemanfaatan harta dengan atau tanpa ada kompensasi atau perolehan balik. Islam mendorong ummatnya untuk menginfaqkan hartanya untuk kepentingan umat yang lain, terutama pihak yang sangat membutuhkan. Islam tidak hanya mendorong kaum muslim untuk memanfaatkan hartanya dengan kompensasi atau perolehan balik yang bersifat materi saja, akan tetapi juga mendorong ummatnya untuk memperhatikan dan menolong pihak-pihak yang memperhatikan dan menolong pihak-pihak yang membutuhkan, serta untuk kepentingan ibadah, misalnya zakat, nafkah anak dan istri, dorongan untuk memberi hadiah, hibah, sedekah pada fakir miskin dan orang yang memerlukan (terlibat hutang, keperluan pengobatan dan musibah); infaq untuk jihad fii sabilillah.

Dalam kaitanya dengan masalah ekonomi yang dialami Indonesia, dengan cara memanfaatkan kepemilikan sebaik mungkin, maka bisa diupayakan untuk bisa menekan atau



menjadi jaminan konsumsi, melainkan hanya menjadi jaminan pertukaran saja, maka pengeluaran seseorang merupakan penghasilan bagi orang lain. Demikian pula sebaliknya.

## 2. Bentuk Transfer dan Subsidi

Untuk menjamin keseimbangan ekonomi bagi pihak yang tidak mampu bergabung dalam mekanisme pasar karena alasan-alasan tertentu, seperti; cacat, idiot dan sebagainya, maka Islam menjamin kebutuhan mereka dengan berbagai cara sebagai berikut:

- a) Wajibnya muzakki membayar zakat yang diberikan kepada mustahik, khususnya kalangan fakir miskin.
- b) Setiap warga negara berhak memanfaatkan pemilikan umum. Negara boleh mengolah dan mendistribusikannya secara cuma-cuma atau dengan harga murah.
- c) Pembagian harta negara seperti tanah, barang dan uang sebagai modal kepada yang memerlukan.
- d) Pemberian harta waris kepada ahli waris.
- e) Larangan menimbun emas dan perak walaupun dikeluarkan zakatnya.

Mekanisme syari'ah Islam yang mengatur persoalan distribusi kekayaan di antara umat manusia tidak terlepas dari pandangan ideologis bahwa semua kekayaan yang ada di alam semesta ini pada hakikatnya adalah milik Allah SWT

kehidupan harus diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Manusia tidak

mempunyai hak untuk mengklaim bahwa semua harta miliknya adalah miliknya secara absolut karena sebenarnya manusia hanya diberi wewenang untuk mengelola dan memanfaatkan harta yang ada di dunia dan pada saatnya akan harus dikembalikan kepada pemilik yang sebenarnya yaitu Allah SWT.<sup>16</sup> Dalam mekanisme distribusi kekayaan perlu adanya sebuah alat tukar yang dalam hal ini adalah uang.

Islam dengan pandangan yang bersumber dari Sang Pencipta Yang Maha Tahu, mengajarkan untuk hanya memfungsikan uang sebagai alat tukar saja. Maka dimana uang beredar, ia pasti hanya akan bertemu dengan barang dan jasa. Semakin banyak uang beredar, semakin banyak pula barang dan jasa yang diproduksi dan diserap pasar. Akibatnya pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat, tanpa ada kekhawatiran terjadi kolaps, seperti pertumbuhan ekonomi dalam sistem Kapitalis. Uang yang pada dasarnya berfungsi sebagai alat tukar kemudian menjadi masalah manakala tidak lagi difungsikan sebagaimana fungsi dasarnya melainkan juga sebagai komoditi.<sup>17</sup>

Islam memiliki pandangan yang khas mengenai sistem moneter. Syekh Abdul Qodim Zallum dalam *kitab al Amwal fi Daulati al Khilafah* mengatakan bahwa sistem moneter adalah sekumpulan kaidah pengadaan dan pengaturan keuangan dalam suatu negara. Yang paling penting dalam setiap keuangan adalah penentuan satuan dasar keuangan dimana kepada satuan itu dinisbahkan seluruh nilai berbagai mata uang lain. Apabila satuan dasar keuangan itu adalah emas, maka sistem keuangannya dinamakan sistem uang emas. Apabila satuan dasarnya

---

<sup>16</sup> Yuliadi, Imamudin, *Ekonomi Islam Filosofi, Teori, dan Implementasi edisi Revisi* (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam, 2007), hal.106-107.

<sup>17</sup> *Sistem Moneter Islam Solusi Atas Kerusakan Sistem Moneter Dunia*, (diunduh pada 17 Agustus 2010); dari <http://khilafahislamiyah.wordpress.com/2007/05/02/sistem-moneter-islam-solusi-atas-kerusakan-sistem-moneter-dunia/>

perak, dinamakan sistem uang perak. Bila satuan dasarnya terdiri dari dua satuan mata uang (emas dan perak), dinamakan sistem dua logam. Dan bila nilai satuan mata uang tidak dihubungkan secara tetap dengan emas atau perak (baik terbuat dari logam lain seperti tembaga atau dibuat dari kertas), sistem keuangannya disebut sistem *fiat money*. Dengan sistem dua logam, harus ditentukan suatu perbandingan yang sifatnya tetap dalam berat maupun kemurnian antara satuan mata uang emas dengan perak. Sehingga bisa diukur masing-masing nilai antara satu dengan lainnya, dan bisa diketahui nilai tukarnya. Misalnya, 1 dinar emas syar'i beratnya 4,25 gram emas dan 1 dirham perak syar'i beratnya 2,975 gram perak. Dengan cara itu, nilai nominal dan nilai intrinsik dari mata uang dinar dan dirham akan menyatu. Artinya, nilai nominal mata uang yang berlaku akan dijaga oleh nilai intrinsiknya (nilai uang itu sebagai barang, yaitu emas atau perak itu sendiri), bukan oleh daya tukar terhadap mata uang lain. Maka, seberapa pun misalnya dollar Amerika naik nilainya, mata uang dinar akan mengikuti senilai dollar menghargai 4,25 gram emas yang terkandung dalam 1 dinar. Depresiasi (sekalipun semua faktor ekonomi dan non ekonomi yang memicunya ada) tidak akan terjadi. Sehingga gejolak ekonomi seperti ini sekarang ini insya Allah juga tidak akan terjadi.

Penurunan nilai dinar atau dirham memang masih mungkin terjadi. Yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu, mengalami penurunan (biasa disebut inflasi emas). Diantaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah besar. Tapi keadaan ini kecil sekali kemungkinannya, oleh karena penemuan emas besar-besaran biasanya memerlukan usaha eksplorasi dan eksploitasi yang



## **G. Jangkauan Penelitian**

Agar pembahasan lebih terfokuskan pada permasalahan yang telah ditentukan, maka penulis memberikan batasan pada skripsi ini. Secara umum penulis membatasi peluang dan tantangan sistem ekonomi islam dalam menangani Krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997-2007.

Meskipun demikian, berbagai hal yang terjadi sebelumnya (sebelum terjadinya krisis tahun 1997) yang menjadi latar belakang peristiwa-peristiwa selanjutnya tetap menjadi pembahasan yang penting untuk membantu memberi jawaban seobyektif mungkin.

## **H. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan ini yakni dengan mencari data dari berbagai perpustakaan, dari media cetak, media elektronik, dan literatur lainnya yang dapat mendukung pembuatan tulisan ini.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis berusaha untuk menuangkannya secara sistematis dari bab ke bab, yakni dari bab I sampai dengan bab V. berikut ini adalah uraian singkat yang termuat dari bab ke bab :

**BAB I** Merupakan pendahuluan yang memuat alasan pemilihan judul,

kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

**BAB II** Merupakan uraian mengenai kronologi krisis ekonomi di Indonesia.

**BAB III** Merupakan uraian mengenai gagalnya resep IMF dan Bank Dunia yang sudah dipakai oleh pemerintah Indonesia dalam menangani krisis ekonomi di Indonesia, sehingga perlu adanya resep lain dalam menangani krisis ekonomi di Indonesia.

**BAB IV** Merupakan uraian tentang pendekatan konsep sistem ekonomi Islam dalam memberi solusi atas kegagalan penyelesaian krisis di